



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2- 57 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DAN PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2023-2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09.M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
  - b. memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan sebagai dasar untuk:
- a. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan Tahunan;
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
  - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
  - f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 6 Februari 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
 NOMOR 100.3.3.2- 57 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 DAERAH TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023-2026

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.  $IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$	BPS OPD Terkait	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : BAPPEDA OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan ( <i>Cross Cutting</i> ): 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Perikanan 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 8. Dinas Kesehatan 9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.  $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Harapan Lama	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. $HLS_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i}{P_i}$	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Indeks	IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat.	Kemenkes	Dinas Kesehatan
	Angka Harapan Hidup	Tahun	AHH adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	BPS	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting	Persen	Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak	BPS	Dinas Kesehatan

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
			balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1. Sangat pendek: Zscore <-3,0 2. Pendek : Zscore $\geq$ - 3,0 s/d Zscore < -2,0 $SP \text{ stunting} = \frac{JAB(5) \text{ Stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$		
Meningkatnya keterampilan hidup ( <i>life skill</i> ) sumber daya manusia	Persentase Penduduk Miskin	Persen	Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$	BPS OPD Terkait	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting): 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9. Dinas Kesehatan 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
					11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	Persen	Panjang jalan kondisi mantap dalam kondisi baik (>40 km/jam) dibagi Panjang jalan kabupaten dikali 100 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	Persen	Volume pemanfaatan sumber air baku dibagi jumlah/volume air baku yang ditangani dikali 100 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	Persen	Jumlah luasan RTH yang memenuhi kebutuhan RTH minimal 30 persen dibagi luas perkotaan dikali 100 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya penyelenggaraan transportasi	Cakupan Layanan Transportasi	Persen	Jumlah layanan transportasi pada pusat pengembangan wilayah dibagi jumlah pusat pengembangan wilayah	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	Luas cakupan layanan telekomunikasi dibagi luas wilayah berpenduduk	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Ratio elektrifikasi	Ratio	Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total.  $RE = \frac{(RE\ pln + RE\ non\ pln)}{RT} \times 100\%$	BPS, PLN	Sekretariat Daerah
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu. $(30\% \times IKU) + (30\% \times IKA) + (40\% \times IKTL)$ IKU = indeks Kualitas Udara IKA = indeks Kualitas Air IKTL = indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	$PHLT = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100\%$ Keterangan: PHLT: Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau JRTHLT: Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau JRT: Jumlah rumah tangga	BPS, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	Desa	Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Desa STBM) bertujuan untuk mengetahui jumlah desa yang telah melaksanakan program STBM. Selain itu data yang telah dikompilasi akan	BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  Koordinator : Bappeda

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
			<p>digunakan sebagai bahan dasar untuk perencanaan kegiatan berkaitan dengan program STBM selanjutnya. Data Desa STBM juga digunakan sebagai indikator kesehatan lingkungan di suatu wilayah. Desa STBM mengacu pada lima pilar STBM, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)</li> <li>2. Cuci Tangan Pakai Sabun</li> <li>3. Pengamanan Makan dan Minum Rumah Tangga</li> <li>4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga</li> <li>5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga</li> </ol>	Penataan Ruang.	<p>OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</li> <li>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.</li> <li>3. Dinas Kesehatan.</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.</li> </ol>
Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ <p>Di mana Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4)</p>	IRBI-BNPB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
			<p>Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.</p>		
<p>Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Persen</p>	<p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun Sekarang dikurang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun lalu dibagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun lalu dikali 100 persen</p>	<p>BPS</p>	<p>Penanggungjawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>3. Asisten Administrasi Umum</li> </ol> <p>Koordinator : Bappeda            OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</li> <li>2. Dinas Kesehatan.</li> <li>3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> <li>4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga</li> <li>5. Dinas Perikanan</li> <li>6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.</li> <li>7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</li> <li>8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>10. Dinas Perhubungan</li> <li>11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</li> <li>13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>14. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ol>

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
	Indeks Gini	Indeks	<p>Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.</p> $GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ <p>GR = Koefisien Gini  <i>f<sub>i</sub></i> = Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i.  <i>Y<sub>i</sub></i> = Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i.</p>	BPS	<p>Penanggungjawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>3. Asisten Administrasi Umum</li> </ol> <p>Koordinator : Bappeda  OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</li> <li>2. Dinas Kesehatan.</li> <li>3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> <li>4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga</li> <li>5. Dinas Perikanan</li> <li>6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.</li> <li>7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</li> <li>8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>10. Dinas Perhubungan</li> <li>11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</li> <li>13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>14. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ol>
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Per kapita	Rp/kapita/tahun	<p>Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu.</p> $PDB \text{ Per Kapita} = \frac{PDB}{\sum \text{penduduk}}$ $PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB}{\sum \text{penduduk}}$	BPS	<p>Penanggungjawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>3. Asisten Administrasi Umum</li> </ol> <p>Koordinator : Bappeda  OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</li> </ol>

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
					<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dinas Kesehatan.</li> <li>3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> <li>4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga</li> <li>5. Dinas Perikanan</li> <li>6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.</li> <li>7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</li> <li>8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>10. Dinas Perhubungan</li> <li>11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</li> <li>13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>14. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ol>
	<p>Persentase Wirausaha yang Tumbuh</p>	<p>Persen</p>	<p>Jumlah wirausaha yang tumbuh tahun sekarang dikurangi jumlah wirausaha yang tumbuh tahun lalu dibagi jumlah wirausaha tahun lalu dikali 100 persen</p>	<p>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.</p>	<p>Penanggungjawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>3. Asisten Administrasi Umum</li> </ol> <p>Koordinator : Bappeda</p> <p>OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> <li>2. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga</li> <li>3. Dinas Perikanan</li> <li>4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.</li> <li>5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</li> <li>6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan</li> </ol>

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
					Anak
Meningkatnya kesempatan kerja	Nilai Investasi	Rupiah	Nilai investasi ( <i>investment value</i> ) adalah nilai dari suatu perusahaan atau saham ( <i>business interest</i> ) atau kepentingan dalam perusahaan yang bersifat spesifik terhadap seorang investor, didasarkan pada atau terkait dengan persyaratan tertentu dari seorang atau kelompok investor.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	<p>Tingkat pengangguran terbuka adalah persenta sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.</p> $TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan:  TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)  PP : Jumlah pengangguran (orang)</p>	BPS	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Dinas Kesehatan. 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 5. Dinas Perikanan 6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan. 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 10. Dinas Perhubungan 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
			PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)		Anak
Terkendalnya inflasi daerah	Tingkat Inflasi	Persen	<p>Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga.</p> $\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}(n-1)}{\text{IHK}(n-1)} \times 100$ <p>Keterangan :  Inflasin = Inflasi pada period ke-n  IHK<sub>n</sub> = Indeks harga konsumen (IHK) pada periode ke-n  IHK<sub>n-1</sub> = Indeks harga konsumen (IHK) pada periode ke-n-1</p>	BPS/ Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan. 4. Dinas Perhubungan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	Indeks RB	Indeks	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB	KemenPAN-RB	Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Bappeda 2. Inspektorat 3. Badan Keuangan Daerah 4. Sekretariat DPRD 5. Sekretariat Daerah 6. BKPSDM
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai/ indeks	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik yang dirilis Ombudsman RI	Ombudsman RI	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Administrasi Umum  Koordinator: Bappeda OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : Perangkat Daerah 1. Sekretariat Daerah

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
					2. Bappeda 3. Inspektorat 4. Sekretariat DPRD 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9. Dinas Komunikasi dan Informatika 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11. Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap layanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan dilakukan minimal satu tahun sekali	OPD Terkait, Bappeda	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Administrasi Umum  Koordinator: Bappeda OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : Perangkat Daerah 1. Sekretariat Daerah 2. Bappeda 3. Inspektorat 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Dinas Komunikasi dan Informatika 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. Kecamatan
Meningkatnya kapabilitas pemerintahan	Indeks Profesional ASN	Indeks	Hasil penilaian profesionalisme ASN oleh BKN	Hasil penilaian oleh BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Nilai Hasil Evaluasi Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Hasil Evaluasi Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Penanggung jawab: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Administrasi Umum Koordinator: Bappeda OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting): Seluruh OPD
	Indeks SPBE	Indeks	Nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada tahun n	Hasil penilaian oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung jawab: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Administrasi Umum Koordinator: Dinas Komunikasi dan Informatika Seluruh OPD
	Maturitas SPIP	Level	Nilai maturitas SPIP pada tahun n	Hasil penilaian oleh Inspektorat	Penanggung jawab: Asisten Administrasi Umum Koordinator: Inspektorat Seluruh OPD
Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	Opini	Opini BPK atas laporan keuangan pada tahun n	BPK	Penanggung jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Umum  Koordinator: Inspektorat, Badan Keuangan Daerah Seluruh OPD
	WBK/WBBM	OPD penyelenggaran WBK/WBBM	WBK/WBBM pada tahun n	Hasil Evaluasi WBK/WBBM oleh Kemenpan-RB	Penanggung jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Umum  Koordinator: Inspektorat Seluruh OPD
	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Umum

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
					Koordinator: Bappeda, Sekretariat Daerah, Inspektorat OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : Seluruh OPD
Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	Nilai IPK yang dirilis oleh KemendikbudRistek	Kemendikbudristek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	MHA	Jumlah MHA pada tahun n	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Umum  Koordinator: Bappeda, Sekretariat Daerah, Inspektorat OPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya budaya literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Nilai indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun n	Hasil penilaian oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	Tingkat Kriminalitas	Persen	Tingkat kriminalitas pada tahun n	Polres Kep.Mentawai	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kesbangpolinmas
Meningkatnya kehidupan masyarakat	Tingkat Kabupaten Layak Anak	Persen	Tingkat kabupaten layak anak pada tahun n yang dirilis Kementerian	Kementerian Pemberdayaan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
gender				Perlindungan Anak	
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	$IPG = \frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia Perempuan}}{\text{Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki}} \times 100\%$	BPS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
 NOMOR 100.3.3.2- 57 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 DAERAH TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Terwujudnya Pendidikan Bagi Semua	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i}{P_i}$	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya akses pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka melek huruf	Persen	Angka Melek Huruf (AMH) adalah Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
				tahun ke atas. $AMH_{15+}^t = \frac{MH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$ dimana: $AMH_{15+}^t$ = Angka Melek Huruf usia 15 tahun keatas pada tahun ke-t $MH_{15+}^t$ = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf pada tahun ke-t $P_{15+}^t$ = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun ke-t		
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rapor Pendidikan	Nilai	Rapor pendidikan adalah sekumpulan capaian pendidikan yang dapat dijadikan petunjuk dan refleksi diri bagi satuan pendidikan dan daerah. Nilai rapor pendidikan kabupaten/kota dikeluarkan oleh Kemendikbudristek setiap tahunnya.	Kemendikbudristek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase PKBM Terakreditasi B	Persen	Jumlah PKBM yang terakreditasi B dibagi jumlah PKBM yang ada dikali 100 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase TK Terakreditasi B	Persen	Jumlah TK yang terakreditasi B dibagi jumlah TK yang ada dikali 100 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase SD Terakreditasi B	Persen	Jumlah SD yang terakreditasi B dibagi jumlah SD yang ada dikali 100 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase SMP Terakreditasi B	Persen	Jumlah SMP yang terakreditasi B dibagi jumlah SMP yang ada dikali 100 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Luhur Budaya	Terwujudnya kemajuan kebudayaan	Indeks pemajuan kebudayaan	Indeks	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi	Mendikbudristek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
				acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Nilai indeks pembangunan kebudayaan dikeluarkan oleh Mendikbudristek		
	Meningkatnya perlindungan dan pelestarian kebudayaan	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang lestari	Persen	Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang lestari dibagi Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang ada/ditetapkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## 2. Dinas Kesehatan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Terwujudnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	AHH adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	BPS	Dinas Kesehatan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
	Meningkatnya akses layanan dan cakupan kesehatan	Cakupan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan	Persen	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan kesehatan dibagi jumlah masyarakat wilayah pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya mutu layanan kesehatan	Jumlah Puskesmas terakreditasi madya	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas terakreditasi madya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas Reakreditasi ulang	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Reakreditasi ulang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat	AKB (Angka Kematian Bayi)	24/100 KH	AKB (Angka Kematian Bayi) adalah Banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 100 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. $AKB = \frac{JK < 1 th}{JLH} \times 100$ Keterangan: AKB : Angka Kematian Bayi (AKB) per 100 kelahiran hidup JK<1th : Jumlah penduduk yang meninggal pada umur < 1 tahun pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		AKI (Angka Kematian Ibu)	306/1000 00 KH	AKI (Angka Kematian Ibu) adalah Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.	BPS	Dinas Kesehatan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
				$AKI = \frac{D_{hamil}}{JLH} \times 1000$ <p><i>D<sub>hamil</sub> : Jumlah Kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran</i>  <i>JLH : Jumlah Kelahiran Hidup</i></p>		
	Meningkatnya kemandirian masyarakat berperilaku hidup sehat	Prevalensi Stunting	Persen	<p><i>Stunting</i> adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:1995/MENKES/SK/XII/2010:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat pendek : Zscore &lt;-3,0</li> <li>2. Pendek : Zscore ≥- 3,0 s/d Zscore &lt; -2,0</li> </ol> $SP \text{ stunting} = \frac{JAB(5)Stunting}{JAB(5)} \times 100\%$	Kementerian Kesehatan - SSGI	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Dinas Kesehatan
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya	Persentase capaian	Persen	Jumlah target kinerja perangkat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
	kualitas kinerja perangkat daerah	kinerja perangkat daerah		yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen		

### 3. Rumah Sakit Umum Daerah

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Terwujudnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	AHH adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	BPS	Rumah Sakit Umum Daerah
	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di rumah sakit	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar	Persen	Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit dibagi jumlah sarana dan prasarana rumah sakit yang tersedia dikali 100 persen	RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
		Persentase ketersediaan SDM sesuai standar Rumah Sakit	Persen	Jumlah ketersediaan SDM sesuai standar Rumah Sakit dibagi Jumlah SDM Rumah sakit yang ada dikali 100 persen	RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
	Meningkatnya standar layanan Rumah Sakit	Nilai Survey Akreditasi RS yang memenuhi SNARS	Predikat	Nilai Survei akreditasi rumah sakit dikeluarkan Kementerian Kesehatan	Kementrian Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
		Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Rumah Sakit	Persen	Jumlah indikator pelayanan rumah sakit yang terpenuhi dibagi total indikator dikali 100 persen	RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Rumah Sakit Umum Daerah
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah

#### 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Persentase jalan mantap	Persen	Panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi Panjang jalan yang ada dikali 100 persen	PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Cakupan jaringan irigasi	Hektar	Luasan sawah yang dialiri jaringan irigasi dibagi total luasan sawah.	PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
	Optimalisasi pengendalian daya rusak air	Persentase berkurangnya wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	Persen	$D = \frac{D_n - D_{n-1}}{D_{n-1}} \times 100 \%$ Ket: D = Berkurangnya luasan wilayah rawan abrasi, longsor, erosi. D <sub>n</sub> = Luasan wilayah rawan abrasi, longsor, erosi tahun n D <sub>n-1</sub> = Luasan wilayah rawan abrasi, longsor, erosi tahun sebelumnya (n-1).	PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	Persen	Luasan kawasan perkotaan yang mencapai RTH minimal 30% dibagi luasan wilayah perkotaan	PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Rasio	Perbandingan antara jumlah bangunan ber-IMB dengan jumlah bangunan yang ada	PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih layak	Persen	Jumlah rumah tangga dengan akses air bersih layak dibagi jumlah rumah tangga dikali 100 persen	PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Optimalisasi pengelolaan sanitasi (limbah, sampah, dan drainase) berwawasan lingkungan	Rata-rata capaian rumah tangga bersanitasi layak (limbah, sampah dan drainase)	Persen	Jumlah rumah tangga bersanitasi layak dibagi jumlah rumah tangga dikali 100 persen	PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/SASA RAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Terwujudnya pembangunan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100 persen	DPKP	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	DPKP	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	DPKP	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

#### 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban	Tingkat kriminalitas	Persen	Jumlah Kejadian kriminalitas per 100 ribu penduduk	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Kepala Daerah	umum dan perlindungan masyarakat				Kebakaran	Kebakaran
	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	Jumlah Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah yang ditegakkan dibagi Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang seharusnya ditegakkan dikali 100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Persentase penyelesaian pelanggaran TIBUM yang tertangani	Persen	Jumlah pelanggaran TIBUM yang tertangani dikali dibagi jumlah Pelanggaran TIBUM dikali 100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya Integrasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan terhadap masyarakat	Persentase penanganan bahaya kebakaran	Persen	Jumlah penanganan bahaya kebakaran dibagi jumlah kejadian kebakaran dikali 100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

## 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Integrasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana	Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang ditetapkan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	Persen	Jumlah kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana dibagi jumlah kelompok masyarakat di daerah bencana dikali 100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya penanganan kedaruratan bencana	Persentase Bencana yang tertangani	Persen	Jumlah bencana tertangani dibagi Jumlah kejadian bencana dikali 100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## 8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Keterampilan Hidup (Life skill) Sumber	Terwujudnya kesejahteraan sosial	Persentase Penurunan PMKS	Persen	Jumlah PMKS Tahun Sekarang dikurang jumlah tahun lalu dibagi jumlah PMKS tahun lalu dikali 100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Daya Manusia	masyarakat			persen	Perlindungan Anak	Perlindungan Anak
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PMKS	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya	Persen	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhannya dibagi jumlah PMKS dikali 100 persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan dan anak	Persentase penurunan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun Sekarang dikurang jumlah tahun lalu dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun lalu dikali 100 persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Terwujudnya Kehidupan Petani yang	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks	BPS, Dinas Ketahanan Pangan dan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

	Sejahtera			harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.	Pertanian	
	Meningkatnya ketahanan pangan	Rasio cadangan pangan utama	Rasio	Perbandingan antara ketersediaan pangan utama dengan kebutuhan pangan utama	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Persentase peningkatan produksi lahan, produktifitas mutu produksi tanaman pangan, hortikultural perkebunan dan peternakan	Persen	$D = \frac{D_n - D_{n-1}}{D_{n-1}} \times 100 \%$ Ket: D = Peningkatan Produksi Tanaman Dn = Jumlah produksi tanaman tahun n Dn-1 = Jumlah produksi tanaman tahun sebelumnya (n-1).	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

#### 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya Lingkungan yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	IKLH Kabupaten = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%) IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IPA = indeks Kualitas air IPU = indeks Kualitas udara ITH = indeks tutupan hutan	Dinas LHK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan	Indeks Kualitas Air	Indeks	Indeks Kualitas Air (Water Quality Index / WQI) adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi. $IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{CI}{Lij}\right)^2 m + \left(\frac{CI}{Lij}\right)^2 R}{2}}$	Dinas LHK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Indeks Kualitas Udara	Persen	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. $Q = K \times FE$ Q = Kekuatan Emisi K = Konsumsi Bahan Bakar FE = Faktor Emisi	Dinas LHK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Luhur Budaya	Terwujudnya Pelestarian Masyarakat Adat	Jumlah MHA yang dilestarikan	MHA	Jumlah MHA yang ditetapkan dilestarikan	Dinas LHK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Dinas LHK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	'PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Dinas LHK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

#### 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Kependudukan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Sesuai dengan SK Menpan No.14 Tahun 2017 tentang survey kepuasan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan dokumen KTP-el	Persen	Jumlah Masyarakat yang memiliki KTP-el dibagi jumlah masyarakat berusia 17 Tahun keatas dikali 100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	Persen	Jumlah Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga dibagi Jumlah Keluarga dikali 100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan	Persen	Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan dibagi Jumlah Keluarga dikali 100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Cerai	Persen	Jumlah Kepemilikan Dokumen Cerai dibagi Jumlah Keluarga yang bercerai dikali 100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Lahir	Persen	Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta Lahir dibagi Jumlah Kelahiran dikali 100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan	Persen	Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta Mati dibagi Jumlah Kematian	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
		Dokumen Akta Mati		dikali 100 persen	dan Pencatatan Sipil	dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih	Persen	Hasil Data Konsolidasi Bersih antara Kemendagri dengan Pemerintah Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Keterampilan Hidup (Life skill) Sumber Daya Manusia	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera	Persentase keluarga pra sejahtera beralih ke keluarga sejahtera I	Persen	Jumlah keluarga pra sejahtera yang beralih ke keluarga sejahtera I dibagi jumlah pra sejahtera dikali 100 persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah desa	Desa	Jumlah Desa Maju, Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal dikeluarkan dalam dokumen Indeks Desa Membangun (IDM)	Kemendes PPDT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya desa	Persentase BUMDes dengan capaian aset > 300 juta	Persen	Jumlah BUMDes dengan capaian aset > 300 juta dibagi jumlah BUMDes dikali 100 persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Persentase pasangan usia subur dengan aktif KB	Persen	Jumlah pasangan usia subur dengan aktif KB dibagi Jumlah Pasangan usia subur dikali 100 persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya perencanaan keluarga berencana	Rata-rata usia kawin pertama	Persen	Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan.	BPS/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya kualitas kinerja	Persentase capaian kinerja perangkat	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target	Dinas Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
	perangkat daerah	daerah		kinerja dikali 100 persen	Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 13. Dinas Perhubungan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya penyelenggaraan transportasi	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah	Cakupan pusat kegiatan wilayah yang terhubung	Persen	Jumlah pusat kegiatan wilayah yang terhubung dibagi jumlah pusat kegiatan wilayah dikali 100 persen	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Penyelenggaraan transportasi	Persentase wilayah yang terlayani angkutan laut dan darat	Persen	Jumlah wilayah yang terlayani angkutan laut atau jumlah wilayah yang terlayani angkutan darat dibagi jumlah wilayah (Desa) dikali 100 persen	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna angkutan	Menurunnya tingkat kecelakaan transportasi	Persen	Jumlah kasus tahun ini dikurang kasus tahun lalu dibagi kasus tahun lalu dikali 100 persen	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Dinas Perhubungan
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

## 14. Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Nilai SPBE	Indeks	Nilai SPBE yang diterbitkan Kementerian Kominfo	Kementerian Kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Persentase layanan elektronik terhadap masyarakat	Persen	Jumlah layanan elektronik yang diterima masyarakat dibagi Jumlah layanan elektronik dikali 100 persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan informasi publik berbasis elektronik yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Persen	Jumlah layanan informasi publik berbasis elektronik yang dimanfaatkan oleh masyarakat dibagi Jumlah informasi Publik dikali 100 persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

## 15. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya	Terwujudnya	Kontribusi sektor	Persen	Jumlah nilai bruto sektor industri	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
kesempatan kerja	UMKM yang berdaya saing	industri pengolahan terhadap PDRB		pengolahan dibagi total PDRB kali 100 persen	Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Kontribusi sektor jasa perdagangan terhadap PDRB	Persen	Jumlah nilai bruto sektor industri Perdagangan dibagi total PDRB kali 100 persen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Pertumbuhan Koperasi	Persen	Jumlah Koperasi tahun sekarang dikurang jumlah koperasi tahun lalu dibagi koperasi tahun lalu dikali 100 persen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase Koperasi Aktif	Persen	Jumlah koperasi yang melakukan RAT	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase Koperasi Sehat	Persen	Jumlah koperasi yang memperoleh laba/keuntungan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Persen	Jumlah usaha koperasi tahun sekarang dikurang jumlah usaha koperasi tahun lalu dibagi jumlah usaha koperasi tahun lalu dikali 100 persen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya Pengembangan usaha perdagangan	Persentase Pertumbuhan nilai penjualan (Omset usaha perdagangan)	Persen	Nilai penjualan usaha perdagangan tahun sekarang dikurang nilai usaha perdagangan tahun lalu dibagi nilai usaha penjualan tahun lalu dikali 100 persen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Pertumbuhan	Persen	Jumlah usaha perdagangan tahun	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
		usaha perdagangan		sekarang dikurang jumlah usaha perdagangan tahun lalu dibagi nilai usaha perdagangan tahun lalu dikali 100 persen	Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Realisasi retribusi pasar	Persen	Jumlah retribusi pasar yang diterima dibagi jumlah target ditribusi pasar dikali 100 persen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Rata-rata koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting antar pulau	Persen	Rata-rata koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting antar pulau	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Rata-rata koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting antar wilayah	Persen	Rata-rata koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting antar wilayah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase usaha dagang tertib ukur		Jumlah usaha dagang tertib ukur dibagi jumlah usaha dagang dikali 100 persen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatnya Kapasitas UMKM	Cakupan bina kelompok UKM Produktif (Modal di atas 50 juta)	Persen	Jumlah kelompok UKM dengan modal diatas 50 juta rupiah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase usaha non formal beralih keusaha formal (mikro/kecil)	Persen	Jumlah usaha non formal yang beralih ke usaha formal dibagi jumlah usaha non formal dikali 100 persen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya Kualitas	Terwujudnya	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh	Inspektorat	Dinas Koperasi

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	kualitas tata kelola perangkat daerah			Inspektorat setiap tahunnya		Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan

#### 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	Tingkat pengganguran terbuka	Persen	Jumlah pengganguran terbuka dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 persen	BPS	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Rata-rata lama pengurusan izin	hari	Jumlah rata-rata hari lamanya pengurusan izin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi	Pelaku usaha	Jumlah calon pelaku usaha yang berinvestasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Menurunnya tingkat pengganguran	Persentasi pencari kerja yang mendapat pekerjaan	Persen	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan dibagi jumlah pencari kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
Meningkatnya budaya literasi	Terwujudnya Budaya Literasi	Indeks pembangunan literasi	Indeks	Nilai indeks pembangunan literasi yang dirilis Perpusnas	Perpusnas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat	Nilai Tingkat budaya kegemaran membaca	Nilai	Nilai Tingkat budaya kegemaran membaca	Perpusnas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Meningkatnya kapabilitas pemerintahan	Meningkatnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Nilai tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Nilai	$T = \frac{(a + i + s + j)}{4}$ a = Persentase arsip aktif yang telah dibuat daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftarnya s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

18. Dinas Perikanan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat di sektor perikanan	Pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Persen	$\frac{n - (n - 1)}{(n - 1)} \times 100\%$ Ket n = Realisasi PDRB tahun berjalan n-1 = Realisasi PDRB tahun lalu	BPS	Dinas Perikanan
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah hasil produksi perikanan tangkap	Ton	Jumlah hasil produksi perikanan tangkap dibagi jumlah hasil produksi dikali 100 persen	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah hasil produksi perikanan budidaya	Ton	Jumlah Produksi perikanan budidaya dibagi jumlah produksi perikanan dibagi 100 persen	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Meningkatnya Produksi Pengolahan dan pemasaran	Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dibagi jumlah produksi dikali 100 persen	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Dinas Perikanan
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan

19. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya pendapatan	Terwujudnya pembangunan	Kontribusi sektor jasa pariwisata	Persen	Jumlah nilai/output sektor jasa pariwisata dibagi jumlah PDRB	BPS	Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
masyarakat	pariwisata berkelanjutan	terhadap PDRB		dikali 100 persen		Olahraga
	Meningkatnya rata-rata lama kunjungan wisatawan	Rata lama kunjungan wisatawan	Hari	Jumlah lama kunjungan wisatawan dibagi jumlah wisatawan dikali 100 persen	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya PAD sektor Pariwisata	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	Persen	Jumlah Hari Kunjungan Wisata dibagi jumlah Hari dikali 100 persen	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Keterampilan Hidup (Life skill) Sumber Daya Manusia	Terwujudnya pemuda yang produktif	Persentase pemuda yang mandiri/berprestasi	persen	Jumlah pemuda yang mandiri/berprestasi dibagi jumlah pemuda dikali 100 persen	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	Jumlah Prestasi Olahraga dibagi jumlah atlet dikali 100 persen	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah organisasi dikali 100 persen	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

## 20. Sekretariat Daerah

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang prima	Nilai reformasi birokrasi	Nilai	Nilai reformasi birokrasi dirilis oleh Kementerian PAN RB	Kementerian PAN RB	Sekretariat Daerah
	Meningkat kualitas pelayanan publik	Nilai standar pelayanan publik	Nilai	Jumlah Nilai standar pelayanan publik	Ombudsman	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai EKPPD	Nilai	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dirilis Kemendagri	Kemendagri	Sekretariat Daerah
		Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	Persen	Jumlah OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen dibagi jumlah realisasi masing-masing OPD dikali 100 persen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	Nilai	Nilai tingkat kematangan UKPBJ yang dirilis LKPP	LKPP	Sekretariat Daerah
		Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu	Persen	Jumlah OPD yang mengikuti ULP tepat waktu dibagi jumlah OPD dikali 100 persen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Taat Hukum	Penyelesaian perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi	Laporan	Jumlah Penyelesaian perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi pada tahun n dibagi jumlah perkara hukum dikali 100 persen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah	persen	Jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah dibagi jumlah produk hukum dikali 100 persen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	Persen	Jumlah kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah dibagi jumlah program prioritas daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya pembinaan dan kerjasama dengan pemerintah/ lembaga/badan usaha	Persentase MOU yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah MOU yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah MoU dikali 100 persen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kebijakan perekonomian dikali 100 persen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Cakupan desa yang terakses listrik	Desa	Jumlah desa yang terakses listrik dibagi jumlah desa dikali 100 persen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Sekretariat Daerah
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

## 21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen	Persen	Jumlah OPD dengan capaian indikator kinerja perangkat daerah diatas 80 persen dibagi jumlah OPD dikali 100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	Nilai indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dirilis oleh bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya hasil kajian/ penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kajian/ penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Persen	Jumlah kajian Kajian/ penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan dibagi jumlah kajian/penelitian yang telah dibuat dikali 100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## 22. Badan Keuangan Daerah

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang handal	Opini BPK	Opini	Opini BPK yang dirilis oleh BPK	BPK	Badan Keuangan Daerah
	Meningkatnya Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	Jumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan Daerah dikali 100 persen	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase serapan anggaran belanja daerah	Persen	Jumlah Serapan Anggaran Belanja Daerah dibagi Jumlah Belanja daerah dikali 100 persen	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan aset daerah	Persen	Jumlah OPD yang tertib dalam Pengelolaan Aset Daerah dibagi jumlah OPD dikali 100 persen	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Badan Keuangan Daerah
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah

## 23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatkan Kapabilitas	Terwujudnya tata kelola	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks	Nilai indeks kepuasan pelayanan kepegawaian yang dirilis badan	Badan Kepegawaian dan	Badan Kepegawaian dan

pemerintahan	kepegawaian yang berkualitas	kepegawaian		kepegawaian:	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kualitas pelayan ASN	Indeks Profesional ASN	Indeks	Indeks profesional ASN yang dirilis oleh BKN	BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen ASN	Persentase Penempatan Jabatan yang diduduki berdasarkan kompetensi	Persen	Jumlah Penempatan Jabatan yang diduduki berdasarkan kompetensi dibagi jumlah jabatan dikali 100 persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kualitas ASN	Nilai Merit System	Nilai	Nilai Merit System dirilis oleh KASN	KASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### 24. Sekretariat DPRD

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya	Terwujudnya	Indeks kepuasan	Indeks	Indeks kepuasan layanan	Sekretariat	Sekretariat DPRD

Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	kualitas fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	layanan pimpinan dan anggota DPRD		pimpinan dan anggota DPRD dirilis oleh Sekretariat DPRD	DPRD	
	Meningkatnya kualitas fasilitasi rapat pimpinan dan anggota DPRD	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat DPRD tepat waktu	Persen	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat DPRD tepat waktu dibagi jumlah rapat-rapat yang difasilitasi dikali 100 persen	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas fasilitasi aspirasi masyarakat kepada pimpinan dan anggota DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD	Persen	Jumlah aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD dibagi jumlah aspirasi masyarakat yang diterima /ditampung dikali 100 persen	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas fasilitasi proses legislasi oleh DPRD	Persentase Ranperda yang disetujui tepat waktu	Persen	Jumlah Ranperda yang disetujui tepat waktu dibagi jumlah Ranperda yang dibahas dikali 100 persen	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Sekretariat DPRD
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

#### 25. Inspektorat

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang dipercaya	Persentase penurunan temuan	Persen	Jumlah temuan sekarang dikurangi temuan tahun lalu dibagi temuan tahun lalu dikali 100 persen	Inspektorat	Inspektorat
	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Maturitas SPIP	Level	Nilai maturitas SPIP dirilis oleh BPKP	BPKP	Inspektorat

		Persentase tindak lanjut temuan	Persen	Jumlah tindak lanjut temuan dibagi jumlah temuan dikali 100 persen	Inspektorat	Inspektorat
		Kapabilitas APIP	Level	Kapabilitas APIP dirilis oleh BPKP	BPKP	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	WTP	Opini BPK atas laporan keuangan	BPK	Inspektorat
		WBK/WBBM	OPD	WBK/WBBM	WBK/WBBM oleh Kemenpan-RB	Inspektorat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	Inspektorat
		Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	Persen	Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP dibagi Jumlah OPD dikali 100 persen	Inspektorat	Inspektorat
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Inspektorat
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Inspektorat	Inspektorat
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Inspektorat	Inspektorat

26. Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan demokratis	Tingkat kriminalitas	Persen	Jumlah angka/ tindak kejahatan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk dikali 100 persen	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat

					Masyarakat	
	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan yang tertangani	Persen	Jumlah gangguan keamanan yang tertangani dibagi jumlah penganduan gangguan keamanan dibagi 100 persen	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat
	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang hamonis	Persentase konflik SARA tertangani	Persen	Jumlah konflik SARA tertangani dibagi jumlah konflik SARA yang terjadi dikali 100 persen	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya pertisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	Persen	Jumlah pemilih yang memilih dalam pemilu dibagi jumlah pemilih dikali 100 persen	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Persentase ormas terdaftar yang aktif	Persen	Jumlah ormas terdaftar yang melakukan aktivitas (Rencana program) dibagi jumlah ormas dikali 100 persen	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat	Persentase berkurangnya kasus NAPZA	Persen	Jumlah Kasus NAPZA tahun sekarang dibagi jumlah kasus NAPZA tahun lalu dikali 100 persen	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Kantor Kesatuan, Kebangsaan	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan

					Politik dan Perlindungan Masyarakat	Masyarakat
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan, Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat

#### 27. Kecamatan

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung jawab)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Semua Kecamatan	Semua Kecamatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan umu di kecamatan	Penetapan APBDes tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa yang menetapkan APBDes dikali 100 persen	Semua Kecamatan	Semua Kecamatan
		Serapan APBDes diatas 90 persen	Persen	Jumlah desa dengan serapan APBDes diatas 90 persen dibagi jumlah desa dikali 100 persen	Semua Kecamatan	Semua Kecamatan
	Meningkatnya Trantibmas Kecamatan	penanganan kasus kriminal dikecamatan yang tertangani	Persen	Jumlah kasus kriminal yang ditangani dibagi jumlah kasus kriminal dikali 100 persen	Semua Kecamatan	Semua Kecamatan
	Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	aduan yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah aduan dikali 100 persen	Semua Kecamatan	Semua Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang	Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat	Nilai LAKIP	Nilai	Nilai LAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat	Semua Kecamatan

Bersih dan Akuntabel	daerah					
		Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Semua Kecamatan	Semua Kecamatan
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Semua Kecamatan	Semua Kecamatan

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.